

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan dimaknai dari tiga hal penting yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara *continue* atau berkelanjutan, adanya kenaikan pendapatan per kapita, dan kenaikannya harus terus berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Dalam buku “*Economics for Development World: An Introduction*” dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Adapun makna dari pembangunan sebagai suatu proses multidimensi yang didalamnya terjadi suatu “*structural change*” dari sikap, mental, sosial, institusi termasuk target capaian pembangunan seperti percepatan pertumbuhan dan masalah kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bukan hanya dapat menciptakan penambahan *output* atau meningkatkan perekonomian saja, namun juga memberi kesempatan bagi masyarakat dalam melakukan pilihan secara lebih luas, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Artinya akan semakin banyak pilihan barang pemuas kebutuhan dan kesempatan bagi seseorang dalam memilih kesenangan mereka. Dengan demikian adanya pembangunan ekonomi dapat memperkecil jurang atau *gap* diantara negara berkembang dan negara maju.

Pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif yang membutuhkan adanya perubahan struktur yang mendasar seperti mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, kesehatan maupun peningkatan taraf hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu cara perubahan ekonomi miskin yang berbasis sektor pertanian (primer) menuju perekonomian yang berbasis pada kehidupan kota yang *sustainable*. Pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan adanya sebaran pertumbuhan dan pengembangan ekonomi (Blackman *et al.*, 2001)

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai suatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. Adapun tujuan pembangunan menurut Gant (1971) dalam Sirojuzilam (2010) terdapat dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah problematika kehidupan yang sudah menjadi perhatian dunia dan isu tersebut ada pada semua negara (Mukhamad, 2018). Masyarakat miskin memiliki ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang sedang terjadi. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam. Pengaruh dari luar dapat disebabkan kondisi perekonomian suatu negara yang memburuk maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan pengaruh dari dalam dapat disebabkan karena kurangnya usaha dalam meningkatkan kesejahteraan (Prawoto, 2019).

Menurut Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, serta unsur pokok permasalahannya menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini masalah kehidupan yang sifatnya global, artinya masalah kemiskinan ada di semua negara dengan dampaknya yang berbeda.

Menurut Amarta Sen (1987) dalam Houghton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan,

pendidikan yang tidak memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk dan kemiskinan dianggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

Berdasarkan kondisi kemiskinan memiliki 4 bentuk. Berikut empat bentuk kemiskinan tersebut, yaitu (Sumarsono, 2003):

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, hal tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. Garis kemiskinan adalah konsumsi rata-rata yang ditujukan untuk kebutuhan dasar dan berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam konsep penentuan atau penggambaran suatu kriteria seseorang kelompok dalam kelompok miskin, hal ini termasuk kemiskinan absolut.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi karena ketidakseimbangan dalam masyarakat yang meliputi ketimpangan standar kesejahteraan atau ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan daerah yang belum menyeluruh disemua lapisan masyarakat. Daerah tertinggal termasuk dalam kategori daerah yang umumnya

belum tercakup program pembangunan sehingga masyarakat tergolong memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diterima, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang sering terjadi karena masyarakat pada umumnya memiliki perilaku atau kebiasaan yang tidak ingin mengubah taraf hidupnya secara modern tetapi hanya berpegang pada suatu kondisi atau kebiasaan yang telah berlaku sejak lama di dunia lingkungan masyarakat. Kebiasaan seperti itu dapat menyebabkan seseorang berperilaku seperti boros berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, kurang kreativitas, sikap malas dalam segala hal dan sikap yang tidak mampu hidup mandiri atau selalu bergantung pada orang lain.

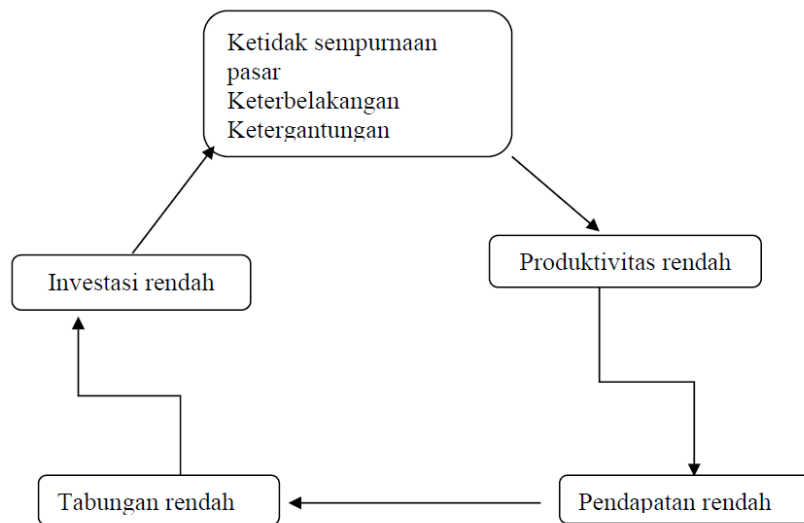
d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bagian dari bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya dan pada umumnya terdapat tatanan sosial, politik dan budaya yang kurang mendukung upaya pengetasan kemiskinan. Jadi ada unsur diskriminatif dalam bentuk kemiskinan struktural ini.

Penyebab kemiskinan menurut Todaro dan Smith (2006) yang terjadi di negara-negara berkembang dari interaksi antara 6 karakteristik, yaitu:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan per kapita masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk harus hidup dibawah tekanan kemiskinan *absolut*.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi, dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi tinggi pada negara berkembang.
- f. Fasilitas pendidikan maupun kurikulumnya masih kurang relevan dan kurang memadai.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (Kuncoro,2006): Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber: Kuncoro (2006: 120)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Selain itu, kemiskinan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri orang miskin, seperti akses yang terbatas, kurangnya lapangan pekerjaan, sumber daya alam yang terbatas. Beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif.

2.1.3 Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam waktu yang sementara, dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan bukan untuk bisnis atau bukan untuk mencari nafkah ditempat yang ia kunjungi, melainkan semata-mata sebagai konsumen yang menikmati perjalanan wisata yang bertujuan untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam (Yoeti:1997).

Kepariwisata menurut UU No.24/1979 diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata yaitu keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan. Pengembangan kawasan wisata ini harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Dalam memutuskan suatu kegiatan pembangunan kawasan wisata harus melalui konsultasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan harus berdasarkan persetujuan masyarakat.
- b. Tiap keuntungan yang dilakukan dalam pembangunan kawasan wisata harus ada timbal balik kepada masyarakat, namun bukan berbentuk *cash money* melainkan berbentuk bangunan yang nantinya berguna untuk masyarakat sekitar.
- c. Kawasan wisata tidak boleh merusak ekosistem di dalamnya serta tidak boleh meninggalkan kebudayaan setempat.

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya dengan satuan rupiah pertahun. Menurut Peta Aksesibilitas dan Profil Kepariwisata (2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

a. Pajak hotel

Pungutan wajib yang di bebaskan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

b. Pajak restoran

Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

c. Pajak hiburan

Pungutan wajib yang di bebaskan kepada setiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat.

d. Pajak pembangunan

Pungutan wajib yang diberikan kepada setiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

Definisi pariwisata menurut *World Tourism Organization* (WTO) dalam Marpaung (2000) adalah sebuah aktifitas perjalanan ke suatu tempat ke luar lingkungan mereka sehari-hari dimana dengan tujuan untuk bersenang-senang, beristirahat yang

tidak lebih dari setahun di tempat daerah yang dituju. WTO mengklasifikasikan wisata menjadi dua yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik.

2.1.3.1 Tingkat Hunian Kamar Hotel

Tingkat hunian kamar berarti tingkat kepadatan hotel yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Damardjati (2001:30) tingkat hunian adalah persentase dari kamar-kamar hotel yang bisa terisi atau disewakan kepada tamu dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang dapat disewakan diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya perhari, perbulan, atau pertahun. Adapun cara untuk memperoleh persentase tingkat hunian kamar adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kamar yang dihuni}}{\text{Jumlah Kamar yang tersedia}} \times 100\%$$

Tingkat hunian kamar yang tinggi dari sebuah hotel akan memberikan keuntungan dan penghasilan yang tinggi bagi hotel tersebut. Hal ini dikarenakan kamar sebagai produk utama yang memberikan profit margin yang paling tinggi dibandingkan dengan produk hotel lainnya seperti laundry, bar, restoran, room service dan sebagainya.

Pada jurnal yang berjudul *Menggali Sumber PAD DIY Melalui Pengembangan Industri Pariwisata (2001)* yang ditulis oleh Barudin dalam jurnalnya menyatakan bahwa ketika jumlah kamar hotel yang tersedia memadai, maka jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung meningkat dan semakin banyak pula permintaan terhadap kamar hotel, sehingga industry pariwisata dan kegiatan yang berkaitan dengan

penginapan baik berbintang atau melati akan memperoleh pendapatan pariwisata serta akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak penghasilan.

2.1.3.2 Wisatawan

Sebagai sumber penerimaan pendapatan, pariwisata tidak terlepas dari pengaruh jumlah kunjungan wisatawan. Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung pada wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan ada penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan menambah devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi daerah tujuan wisata terutama sebagai sumber pendapatan daerah (Nasrul, 2010).

Rantetadung (2012) menyatakan bahwa pengaruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik dan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Menurut Austriana (2005), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka

pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Badan Pusat statistik (BPS) memberikan pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang tertera pada UU.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial (Agustina, 2020).

Menurut Megawati (2019) UMKM adalah salah satu sektor ekonomi potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena mampu menyerap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga jumlah pengangguran menurun dan pada akhirnya tingkat kemiskinan berkurang.

Menurut (Tambunan, 2012) hubungan keberadaan UMK dan kemiskinan di suatu daerah bisa “positif” atau “negatif”. Positif dalam arti keberadaan UMK karena ada kemiskinan. Secara umum, sebuah perusahaan muncul karena ada daya tarik pasar, baik pasar *output* (peluang untuk menjual hasil produksi) dan pasar *input* (peluang untuk mendapatkan *input* untuk berproduksi). Hubungan ini berlaku bagi pertumbuhan UMKM. Di banyak negara berkembang keberadaan pasar *output* dan pasar *input* yang membuat jumlah UMKM tumbuh pesat berhubungan erat dengan kemiskinan.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, akan menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. terdapat dua alasan pendidikan itu penting. Pertama, karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena masyarakat percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kedua, banyak hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan tinggi maka pendapatan dan status sosial dimasyarakat akan terangkat (Gillis, 2000).

Bank Dunia (1990) dalam laporannya dihadapan anggota PBB menyatakan pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tetapi lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan ekonominya.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di negara maju maupun berkembang dalam jangka panjang. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya suatu ilmu yang nantinya dapat menjamin suatu kehidupan yang lebih baik. Mengurangi kemiskinan baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro (2000:484) pengetasan kemiskinan mengintegrasikan insentif untuk pengembangan modal manusia berupa pendidikan diantara keluarga berpendapatan rendah. Peningkatan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendidikan akan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan berakibat pada penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan BPS (2015) indikator keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk melaksanakan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan APK. Karena APM dapat digunakan untuk mengukur indikator presentasi angka partisipasi sekolah dengan kelompok anak sekolah pada waktu dan usia yang sesuai atau tepat waktu. Sedangkan APK digunakan untuk mengukur presentasi anak sekolah dengan usia, waktu yang kurang atau lebih dari seharusnya.

Menurut BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM=100$, maka seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

2.1.6 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja adalah sejumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja.

Menurut Simanjuntak Tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari definisi di tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak

bekerja tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tenaga kerja menurut Simanjuntak tersebut memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja atau buruh dan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Simanjuntak, 2001).

Menurut Sumarsono (2009) tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut rumus perhitungan TPAK:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah angkatan kerja serta semakin besar jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang membuat persentase TPAK juga mengecil.

Menurut Simanjuntak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu:

a. Jumlah Penduduk yang masih Bersekolah

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah, maka angkatan kerja semakin rendah dan berdampak pada TPAK yang juga semakin rendah. Penyediaan fasilitas pendidikan, kondisi serta penghasilan keluarga memberikan pengaruh pada jumlah penduduk yang memutuskan untuk bersekolah.

b. Jumlah Penduduk yang Mengurus Rumah Tangga

Angka TPAK akan semakin rendah jika semakin banyak setiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.

c. Umur

Penduduk laki-laki yang berumur 25-55 tahun dituntut menafkahi keluarga sehingga menyebabkan TPAK relative tinggi. Sedangkan penduduk berusia lebih dari 55 tahun cenderung menurunkan angka TPAK karena usia tersebut produktivitas kerjanya menurun seperti adanya keputusan pensiun.

d. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi kualitas atau jenjang pendidikan individu, maka akan membuat kesempatan kerja semakin luas, sehingga TPAK akan cenderung mengalami kenaikan.

e. Upah

Semakin tinggi upah di pasar tenaga kerja, semakin banyak keputusan anggota yang tertarik masuk pasar kerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, maka selain dari kajian teori yang telah dijabarkan di atas, penulis juga melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini berdasarkan atas kesamaan pembahasan tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	“Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”
	Nama Penelitian	Revygusrivo Fitri Yenti Bur, Mike Triani
	Tahun	Jurnal 2019
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: PAD sektor pariwisata, jumlah hotel, UMKM
	Hasil	Hasil Penelitian ini menunjukkan variabel PAD sektor pariwisata dan jumlah hotel berpengaruh negatif, sedangkan UMKM berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2.	Judul Penelitian	“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”
	Nama Penelitian	Ni Putu Ayu Purnama Margareni, I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa
	Tahun	Jurnal 2016
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan

		Variabel <i>Independen</i>: Pendidikan, inflasi
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
3.	Judul Penelitian	“Pengaruh <i>Gender Ratio</i> , <i>Dependency Ratio</i> dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017”
	Nama Penelitian	Ahmad Ridho Rahmani
	Tahun	Jurnal 2021
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: <i>gender ratio</i> , <i>dependency ratio</i> , TPAK
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel <i>gender ratio</i> dan <i>dependency ratio</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan. Sedangkan Variabel TPAK perempuan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan.
4.	Judul Penelitian	“Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi kasus pada Provinsi Bali)”
	Nama Penelitian	Rahma Aprilia, Rr. Retno Sugiharti
	Tahun	Jurnal 2022
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan negative namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin. Tenaga kerja memiliki hubungan negative dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Bali.

5.	Judul Penelitian	“Kemiskinan di Provinsi Bali (Studi Komparatif Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)”
	Nama Penelitian	Ni Made Wahyu Wijantari, I Komang Gde Bendesa
	Tahun	Jurnal 2016
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: Angka melek huruf, tingkat partisipasi angkatan kerja, gini rasio, daya beli masyarakat
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan Angka melek huruf, tingkat partisipasi angkatan kerja, gini rasio, dan daya beli masyarakat mempengaruhi persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali Tahun 2008-2013.
6.	Judul Penelitian	“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di provinsi Bali (2011-2015)”
	Nama Penelitian	Ivan Zuhlendra
	Tahun	Jurnal 2015)
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: Tingkat pendidikan, jumlah pengunjung pariwisata, jumlah penduduk, jumlah pengangguran
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan dan jumlah pengunjung pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, serta jumlah pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali.
7.	Judul Penelitian	“Pengaruh Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Daya Tarik Wisata terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”
	Nama Penelitian	Kadek Kevin Reynaldi Nugraha, Made Heny Urmila Dewi
	Tahun	Jurnal 2017

	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: Kunjungan wisatawan, pendapatan daya tarik wisata
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daya tarik wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
8.	Judul Penelitian	“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”
	Nama Penelitian	Deljansen YohanesThesia, Ni Luh Karmini
	Tahun	Jurnal 2022
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: Kemiskinan Variabel <i>Independen</i>: Pendapatan per kapita, pertumbuhan UMKM, tingkat pengangguran
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan per kapita, pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.
9.	Judul Penelitian	“Analisis Indikator Ketenagakerjaan dan Demografi terhadap Kemiskinan di Jawa Barat”
	Nama Penelitian	Tete Saepudin, Sestri Nurfala
	Tahun	Jurnal 2022
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: jumlah penduduk miskin Variabel <i>Independen</i>: Pertumbuhan penduduk, IPM, setengah pengangguran, pekerja sector pertanian dan non pertanian
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. IPM memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk

		miskin. Setengah pengangguran berpengaruh tidak signifikan, serta pekerja sector pertanian dan non pertanian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.
10.	Judul Penelitian	“Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Variabel <i>Intervening</i> .”
	Nama Penelitian	Putu Gita Suari Miranti, Layla Fickri Amalia
	Tahun	Jurnal 2023
	Variabel	Variabel <i>Dependen</i>: jumlah penduduk miskin Variabel <i>Independen</i>: Jumlah kunjungan wisatawan, tingkat penghunian kamar
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat penghunian kamar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kemudian Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali secara langsung dapat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat penghunian kamar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Variabel tingkat penghunian kamar adalah variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Bali.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Ketidakmampuan pendapatan yang rendah akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup seperti kesehatan dan pendidikan.

Untuk dapat bertahan dalam persaingan, sangat penting bagi operator hotel untuk konsisten meningkatkan faktor internal dalam mencapai tingkat hunian kamar yang diinginkan karena tingkat hunian kamar menjadi tolak ukur meningkatkan pendapatan yang diterima. Semakin banyak kamar hotel yang terjual, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pengelola hotel tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi angka kemiskinan (Sada Mutlag, 2013).

Terdapatnya industri pariwisata yang berkembang pesat di suatu daerah akan membawa dampak tersendiri bagi daerah tersebut, termasuk mengurangi kemiskinan. Beberapa fakta dari UNWTO (2018) menyatakan pariwisata dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, penerimaan devisa, dan pengembangan daerah. Hal ini terbukti pada data yang terhimpun memaparkan bahwa pariwisata sebagai penyumbang PDB dunia pada tahun 2017 sebesar 10 persen. Kedua, pariwisata mampu menyumbang 1 dari setiap 10

pekerjaan di seluruh dunia dan penyumbang 30 persen ekspor dunia tertinggi yang menghasilkan pendapatan. Selain itu, pariwisata adalah sektor yang berpusat pada penggunaan sumber daya manusia sebagai penggeraknya. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dari wisatawan yang datang akan digolongkan menjadi dua yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang dimana akan di jumlah atau total keseluruhan akan menghasilkan data kunjungan wisatawan.

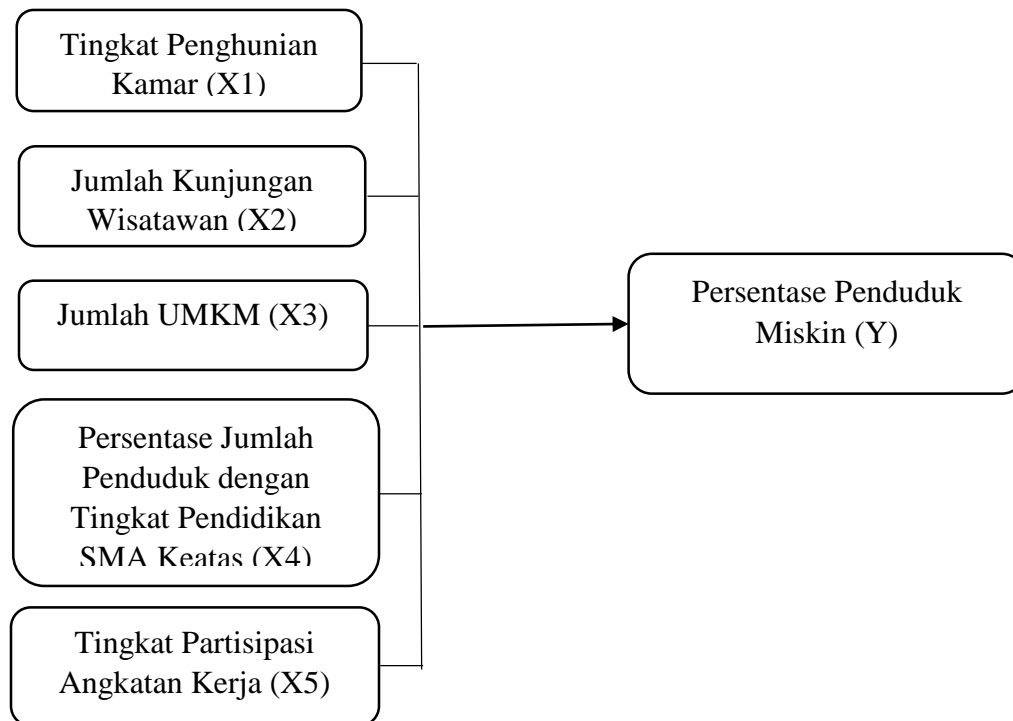
UMKM memiliki peranan sebagai sektor ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada umumnya. Jumlah UMKM yang meningkat dapat membuka peluang kerja yang lebih luas sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Augustin (2015) UMKM dipercaya sebagai salah satu mesin utama dalam penurunan angka kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan memacu perusahaan menambah produksi barang dan jasa sehingga akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja karena meningkatnya produksi barang dan jasa tersebut. Hal ini kemudian akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan”. Pendidikan juga dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*), seseorang yang menjalankan

pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi di bandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di masa depan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya TPAK suatu daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi berkurangnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penelitian ini mengacu pada tingkat kemiskinan. Adapun asumsi dasar variabel ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penghunian Kamar diduga berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.

3. Jumlah UMKM diduga berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.
4. Persentase Jumlah Penduduk dengan Pendidikan SMA Keatas diduga berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diduga berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.

Dengan demikian, secara simultan diduga tingkat penghunian kamar, jumlah kunjungan wisatawan, UMKM, persentase jumlah penduduk dengan pendidikan SMA keatas, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2015-2021.